



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

**BerAKHLAK**  
Berakhlak berkeadilan, berkeadilan berkeadilan  
Berakhlak berkeadilan, berkeadilan berkeadilan

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# LAPORAN Keuangan Semester I 2024

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN  
MAROS, 2024

## KATA PENGANTAR

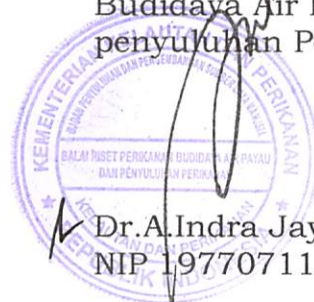
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Maros, 8 Juli 2024  
Kepala Balai Riset Perikanan  
Budidaya Air Payau dan  
penyuluhan Perikanan,



Dr. A. Indra Jaya Asaad, S.Pi, M.Sc  
NIP. 197707112005021001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	1
III. Laporan Operasional	1
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	2
V. Catatan atas Laporan Keuangan	2
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	32
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	50
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	59
F. Pengungkapan Penting Lainnya	63
VI. Lampiran dan Daftar	64





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU  
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

JALAN MAKMUR DG.SITAKKA NO.129 MAROS 90512  
TELEPON (0411) 371544, FAKSIMILI (0411) 371545

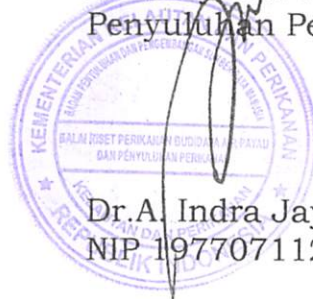
LAMAN: [www.bppbapmaros.kkp.go.id](http://www.bppbapmaros.kkp.go.id) POS ELEKTRONIK: [litkanta@indosat.net.id](mailto:litkanta@indosat.net.id)

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Maros, 8 Juli 2024  
Kepala Balai Riset Perikanan  
Budidaya Air Payau dan  
Penyuluhan Perikanan,



Dr. A. Indra Jaya Asaad, S.Pi, M.Sc  
NIP. 197707112005021001

Laporan Keuangan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Semester I Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara semester I tahun 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp772.744.576 atau mencapai 47,98 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.610.607.000.

Realisasi Belanja Negara pada semester I TA 2024 adalah sebesar Rp55.115.042.688 atau mencapai 50,07 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp110.071.024.000.

**NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Semester I Tahun 2024. Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp478.156.542.188 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.263.857.458; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp280.364.725.567; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp305.486.284.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4.099.762.907 dan Rp474.056.779.281.

**LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp701.583.700, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp58.114.321.001 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp57.412.737.301. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp93.651.666 dan Rp57.319.085.635 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp57.319.085.635.

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp477.041.502.756 ditambah Defisit-LO sebesar Rp57.319.085.635 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp253.947.982 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp54.080.414.178 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp474.056.779.281.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN****Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	30-Jun-23		Realisasi Di Atas (Bawah) Anggaran	% thd Angg	30-Jun-22
		ANGGARAN	REALISASI			REALISASI
<b>PENDAPATAN Negara dan Hibah</b>						
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	1.610.607.000	772.744.576	837.862.424	47,98	409.866.988
<b>JUMLAH PENDAPATAN dan Hibah</b>		<b>1.610.607.000</b>	<b>772.744.576</b>	<b>837.862.424</b>	<b>47,98</b>	<b>409.866.988</b>
<b>BELANJA</b>	B.2.					
Belanja Pegawai	B.3	84.294.923.000	45.566.396.568	38.728.526.432	54,06	38.796.605.423
Belanja Barang	B.4	25.776.101.000	9.548.646.120	16.227.454.880	37,04	6.560.145.054
Belanja Modal	B.5	-	-	-	0,00	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>110.071.024.000</b>	<b>55.115.042.688</b>	<b>54.955.981.312</b>	<b>50,07</b>	<b>45.356.750.477</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

**II. NERACA**

**Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan  
NERACA**

**PER 30 JUNI 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24	31-Des-23
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	819.335.000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	6.368.000	
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	2.677.540	10.965.416
Penyisihan Piutang Tak Tertagih_Piutang Bukan Pajak	C.1.7	-	(54.827)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		2.677.540	10.910.589
Persediaan	C.1.10	435.476.918	232.311.353
Jumlah Aset Lancar		<b>1.263.857.458</b>	<b>243.221.942</b>
<b>ASET TETAP</b>	C.2		
Tanah	C.2.1	110.131.222.872	283.798.727.500
Peralatan dan Mesin	C.2.2	30.358.608.503	30.358.608.503
Gedung dan Bangunan	C.2.3	100.387.939.350	126.318.570.439
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	107.921.269.736	107.731.192.754
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	745.515.000	745.515.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.6	122.384.000	122.384.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(69.302.213.894)	(72.741.747.732)
Jumlah Aset Tetap		<b>280.364.725.567</b>	<b>476.333.250.464</b>
<b>PROPERTI INVESTASI</b>			
Properti Invesstasi		199.662.006.717	-
Akumulasi penyusutan properti inverstasi		(3.439.533.838)	-
Jumlah Properti Investasi		<b>196.222.472.879</b>	<b>-</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	-	686.788.265
Aset lain lain	C.4.2	2.434.211.350	2.534.814.350
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	(2.128.725.066)	(2.649.951.147)
Jumlah Aset Lainnya		<b>305.486.284</b>	<b>571.651.468</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>478.156.542.188</b>	<b>477.148.123.874</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	C.5		
Utang pada Pihak Ketiga	C.5.2	3.008.770.562	106.621.118
Utang yang belum ditagihkan	C.5.3	271.657.345	
Uang Muka dari KPPN	C.5.4	819.335.000	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>4.099.762.907</b>	<b>106.621.118</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.7	474.056.779.281	477.041.502.756

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**



### III. LAPORAN OPERASIONAL

## Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24	30-Jun-23
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	701.583.700	768.110.301
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>701.583.700</b>	<b>768.110.301</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	48.256.239.052	40.302.215.142
Beban Persediaan	D.3	769.469.715	420.667.723
Beban Barang Jasa	D.4	7.604.555.476	7.200.906.132
Beban Pemeliharaan	D.5	1.058.090.868	1.007.249.515
Beban Perjalanan Dinas	D.6	426.020.717	482.698.333
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	4.004.013.951
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(54.827)	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>58.114.321.001</b>	<b>53.417.750.796</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(57.412.737.301)</b>	<b>(52.649.640.495)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/defisit pelepasan aset non lancar	D.12	58.591.750	1.250.000
Pendapatan pelepasan aset non lancar		62.873.000	1.250.000
Beban pelepasan aset non lancar		4.281.250	-
Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional lainnya		35.059.916	22.818.696.233
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya		35.059.916	22.818.696.233
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Lainnya</b>		<b>93.651.666</b>	<b>22.819.946.233</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT Kegiatan Non Operasional</b>		<b>(57.319.085.635)</b>	<b>(29.829.694.262)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan PNB	D.13	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(57.319.085.635)</b>	<b>(29.829.694.262)</b>

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023***(Dalam Rupiah)*

<b>URAIAN</b>	<b>CATATAN</b>	<b>30-Jun-24</b>	<b>30-Jun-23</b>
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	<b>477.041.502.756</b>	<b>483.848.745.234</b>
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(57.319.085.635)	(29.829.694.262)
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.4	253.947.982	(22.723.986.933)
PENYESUAIN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
KOREKSI Atas Reklasifikasi	E.4.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.4.4	-	-
KOREKSI Nilai aset Non Revaluasi	E.4.5	253.947.982	(22.723.986.933)
KOREKSI Lain-Lain	E.4.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	54.080.414.178	46.188.859.862
<b>kenaikan/penurunan ekuitas</b>		<b>(2.984.723.475)</b>	<b>(6.364.821.333)</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>		<b>474.056.779.281</b>	<b>477.483.923.901</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana Strategis*

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 2005/BALAP.007/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Entitas berkedudukan di Jalan Makmur Dg. Sitakka No.129, Maros.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan merupakan amanah dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

##### A.1.1. Struktur Organisasi

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No : 75/PERMEN-KP/2020 adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan



Gambar 1. Struktur Organisasi BRPBAPPP

Berdasarkan struktur organisasi maka Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan;
- b. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Swadaya, dan Swasta;
- c. Pengelolaan prasarana sarana riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan; dan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) dipimpin oleh seorang Kepala. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Balai dibantu oleh Kepala Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan

keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas, ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing sesuai dengan bidang tugas Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsional Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan harus Menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan menyampaikan laporan kepada kepala badan yang menangani riset dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Setiap unsur di lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air



Payau dan Penyuluhan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

#### **A.1.2 SDM BRPBAPPP**

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bidang riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan sesuai dengan PERMEN KP 75/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BRPBAPPP. BRPBAPPP mengemban tugas sebagai balai riset perikanan budidaya air payau dan sebagai balai penyuluhan perikanan yang memiliki wewenang sebagai Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) penyuluhan perikanan yang terdiri dari 47 kabupaten/kota di 3 Provinsi, yaitu: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

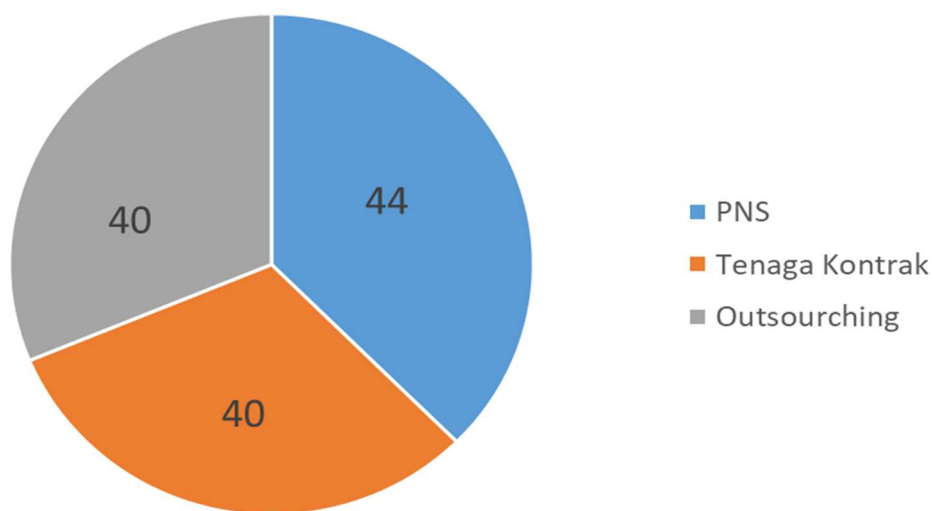
Dalam rangka mengakselerasi tugas BRPBAPPP tersebut, masing-masing pegawai/pejabat harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal. Masing-masing jabatan memerlukan kualifikasi tertentu dalam hal pengetahuan dan keterampilan, oleh karena itu perlu upaya peningkatan SDM melalui pendidikan formal dan non formal diantaranya diklat, seminar, bimbingan teknis maupun sosialisasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan. Administrasi dan pengelolaan kepegawaian juga dituntut melakukan tugas pokok dan fungsinya secara cermat, untuk mendukung administrasi dan karier kinerja PNS berdasarkan sistem merit. Dalam sistem merit ini, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: tanggal/bulan pengangkatan,

kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, kenaikan gaji berkala, program pengembangan pegawai melalui tugas belajar, ijin belajar, pelatihan jabatan, pelatihan dan pendidikan keterampilan.

Sistem pengadministrasian di kepegawaian dilakukan secara tepat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga administrasi pegawai dapat terdokumentasikan dengan baik dan data kepegawaian dapat tersaji secara tepat, baik dan akurat.

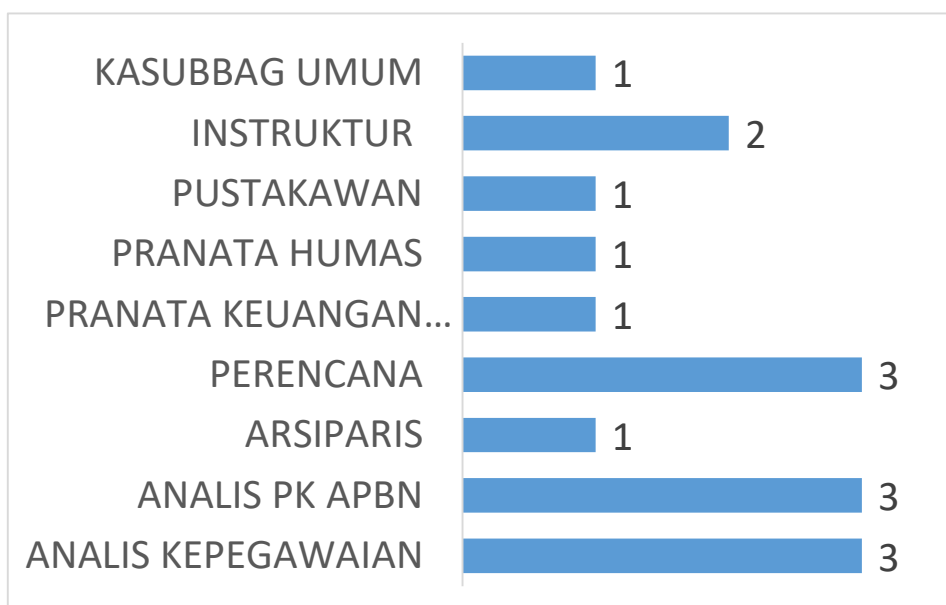
Kinerja suatu unit kerja dapat dicapai dengan optimal apabila masing-masing pegawai/pejabat melaksanakan tugas secara maksimal. Masing-masing jabatan memerlukan kualifikasi tertentu dalam hal pengetahuan dan keterampilan, maka perlu upaya peningkatan SDM melalui pendidikan non formal diantaranya diklat, bimbingan teknis maupun sosialisasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan. Dukungan sumber daya manusia pada program/kegiatan riset dan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan mutlak sangat diperlukan. Pegawai BRPBAPPP memiliki berbagai latar belakang pendidikan dari tingkat dasar (SD). sampai dengan pasca sarjana (S3) yang ditempatkan di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, Instalasi Riset Maranak, Instalasi Perbenihan Budidaya Udang Windu di Barru dan Instalasi Tambak Percobaan di Punaga Takalar Jumlah pegawai Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros pada bulan maret tahun 2023 sebanyak 388 orang yang terdiri dari 44 orang PNS Manajerial, PNS Penyuluh Perikanan 388 orang dan P3K Penyuluh sebanyak 39 orang, dan Penyuluh Perikanan Bantu sebanyak 195 orang. Masing-masing pegawai tersebut ditempatkan di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, Instalasi Riset Maranak, Instalasi Riset Perbenihan Budidaya Udang Windu Di Barru dan Instalasi Tambak Percobaan di Punaga Takalar Sedangkan para penyuluh perikanan tersebar di 3 Provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi

## Tenggara

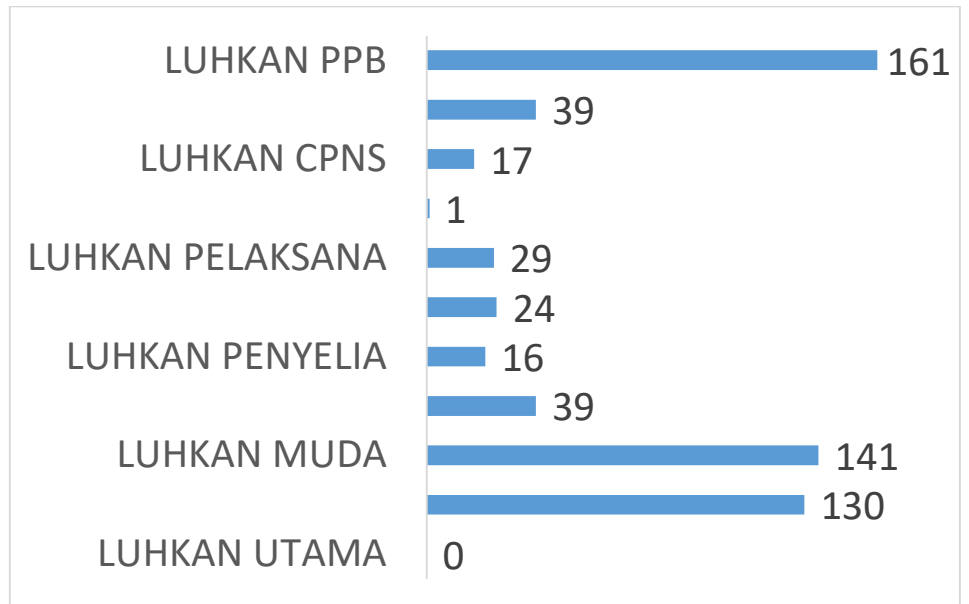


Grafik 1. Data Kepegawaian Bulan Maret 2023

Berdasarkan data kepegawaian pada bulan Maret 2023 total SDM BRPBAP-PP sebanyak 471 orang. Sebaran Outsourcing terdiri dari 17 orang Manajerial dan Laboratorium, 4 orang Driver, 2 orang Satpam, 17 orang Cleaning Service.



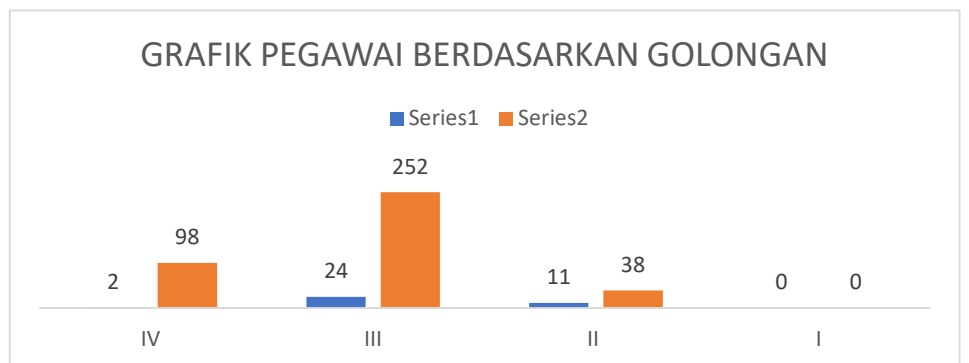
Grafik 2. Jabatan Fungsional Umum: 18 orang



Grafik 3. Total Luhkan PNS : 381 orang dan Total Luhkan CPNS : 17 orang

#### a. Menurut Golongan

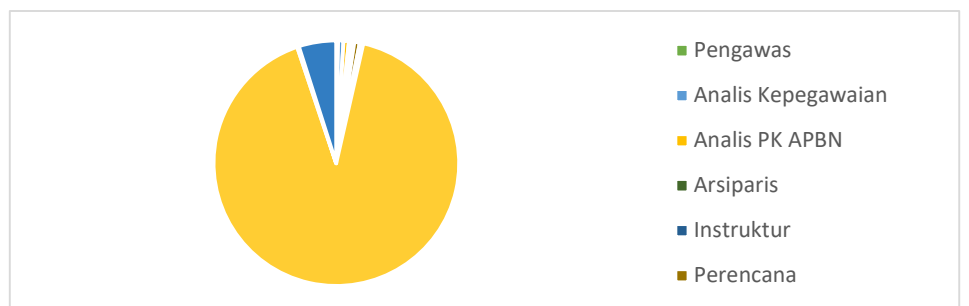
Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV sebanyak 100 orang (2 orang riset dan 98 orang penyuluh), Golongan III sebanyak 276 orang (24 orang riset dan 252 orang penyuluh), Golongan II sebanyak 49 orang (11 orang riset dan 38 orang penyuluh), dan Golongan I tidak ada.



Grafik 4. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

#### b. Menurut Struktural dan Fungsional

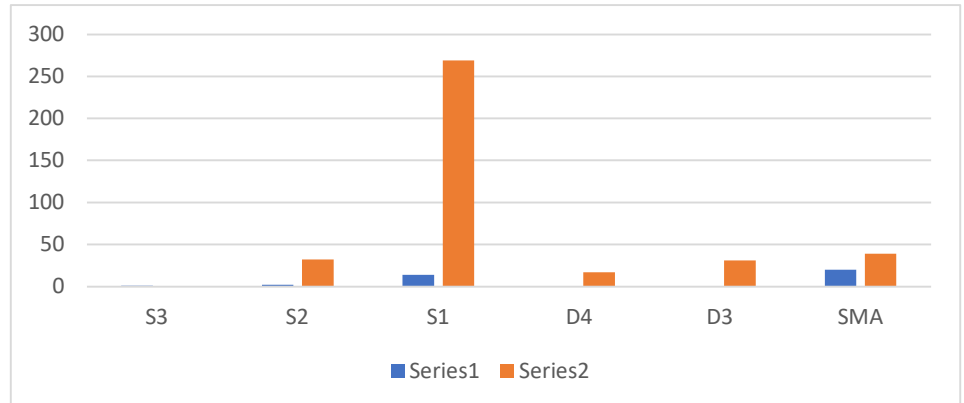
Jumlah pegawai menurut jabatan: Jabatan Pengawas (Struktural) 1 orang, Analis Kepegawaian 3 orang, Analis PK APBN 3 orang, Arsiparis 1 orang, Instruktur 2 orang, Perencana 3 orang, Pranata Humas 1 orang, Pranata Keuangan APBN 1 orang, Penyuluh Perikanan 388 orang, Pustakawan 1 orang, dan Fungsional Umum 21 orang.



Grafik 5. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

**c. Menurut Pendidikan**

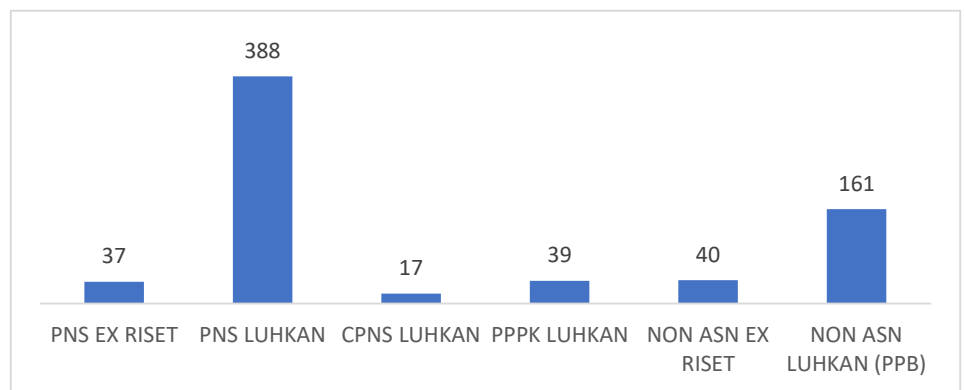
Rincian jumlah pegawai berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut : S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 34 orang, S1/D4 sebanyak 300 orang, D3 sebanyak 31 orang, SLTA sebanyak 59 orang.



**Grafik 6. Grafik Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan**

**d. Menurut Status Kepegawaian**

Jumlah pegawai menurut status kepegawaian sebanyak 682 orang yang terdiri dari: CPNS/PNS sebanyak 442 orang yang terdiri dari 37 orang dari ex riset dan sebanyak 405 orang dari penyuluhan; PPPK sebanyak 39 orang dari penyuluhan; Tenaga Kontrak sebanyak 201 orang yang terdiri dari 40 orang pegawai kontrak dari ex riset dan sebanyak 161 orang PPB (Penyuluh Perikanan Bantu).



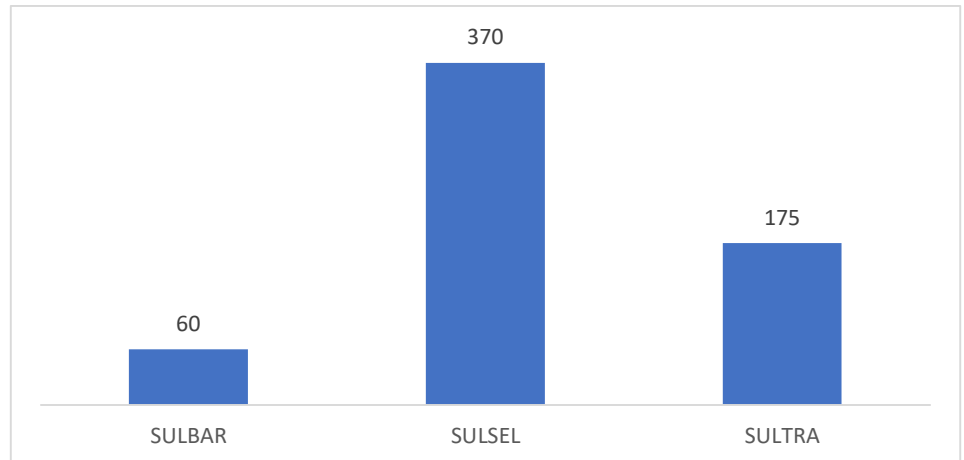
Grafik 7. Grafik Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian

**e. Persebaran Penyuluh**

Jumlah Penyuluh Perikanan (ASN dan PPB) secara keseluruhan ada 605 orang, dengan rincian Penyuluh Perikanan ASN di setiap wilayah penyebarannya adalah sebagai berikut : Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 281 orang, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 127 orang,



Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 36 orang serta Jumlah Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) sebanyak 161 orang terdiri dari wilayah Sulawesi Selatan sebanyak 89 orang, wilayah Sulawesi Tenggara sebanyak 48 orang dan Sulawesi Barat sebanyak 24 orang.



**Grafik 8. Grafik Jumlah Penyuluh Berdasarkan Wilayah Penyebarannya**

### A.1.3 Aset/ Sarana Prasarana



### *Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan*

### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

### **A.3 Basis Akuntansi**

#### *Basis Akuntansi*

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### *Dasar Pengukuran*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### *Kebijakan Akuntansi*

### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-

dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan **Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan** adalah sebagai berikut:

*Pendapatan- LRA*      **(1) Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan LO*      **(2) Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.

Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

*Belanja*

**(3) Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ,

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

*Aset*

**5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan

naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal, Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

<b>Kualitas Piutang</b>	<b>Uraian</b>	<b>Penyisihan</b>
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

#### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:



Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### *Penyusutan Aset Tetap*

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

Tanah;

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang

dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

#### **d. Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

#### **e. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

**Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

**Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## *Ekuitas*

### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp110.071.024.000. Selama Semester I tahun 2024, dilakukan revisi atas DIPA Awal BRPBAPPP yang disebabkan adanya realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan berupa penambahan anggaran kegiatan Smart Fisheries Village yang berasal dari Pemanfaatan PNBP. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

### Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNBP	1.610.607.000	772.744.576
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.610.607.000</b>	<b>772.744.576</b>
Belanja		
Belanja Pegawai	84.294.923.000	45.566.396.568
Belanja Barang	25.776.101.000	9.548.646.120
Belanja Modal		
Belanja Bantuan Sosial		
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>110.071.024.000</b>	<b>55.115.042.688</b>

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan  
Rp772.744.576

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp772.744.576 atau mencapai 47,9 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.610.607.000. Pendapatan di satuan kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi, Pendapatan Penelitian/riset, survey, pemetaan, dan pengembangan iptek Lainnya dengan rincian sebagai berikut:



Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Semester I TA 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya	1.225.662.000	561.259.650	45,79
Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi	276.945.000	956.500	0,35
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	100.000.000	33.524.010	33,52
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	-	62.873.000	-
Pendapatan penjualan hasil produksi Non Litbang Lainnya	5.000.000	82.506.000	1.650,12
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	3.000.000	20.660.000	688,66
Penerimaan kembali belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		10.965.416	0
<b>Jumlah</b>	<b>1.610.607.000</b>	<b>772.744.576</b>	<b>47,9</b>

Realisasi pendapatan BRPBAPPP dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pendapatan Penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya dimana estimasi pendapatannya sebesar Rp.561.259.650 dengan realisasi sebesar Rp.1.225.662.000.
- Pengembalian Pengujian, sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi lainnya sebesar Rp.20.660.000
- Pendapatan Sewa, Gedung dan Bangunan senilai Rp. 33.524.010
- Pendapatan penjualan peralatan dan mesin Rp. 62.873.000 berupa Penjualan peralatan dan mesin sesuai risalah lelang No.731/15.02/2024-01 tanggal 12 juni 2024.

- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya sebesar Rp.20.660.000.
- Penerimaan Kembali belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp.10.965.416

Keseluruhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada BRPBAPPP sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2015.

Keseluruhan pendapatan yang diterima BRPBAPPP merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan telah ditatausahakan oleh bendahara penerimaan dan di setorkan ke kas Negara baik melalui surat bukti setoran pajak maupun dengan pemotongan surat perintah membayar. Merujuk pada aturan penyetoran PNBP, satker BRPBAPPP telah menggunakan aplikasi SIMPONI dalam pengelolaan Penyetoran Penerimaan Negara.

Realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami kenaikan 0,01 persen dibandingkan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Pendapatan  
30 Juni TA 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya	561.259.650	602.012.500	107,26
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	62.873.000	1.250.000	1,98
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	33.524.010	24.653.313	73,54
Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi	956.500	130.000.000	13.591,22
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	20.660.000	8.890.000	43,03
Pendapatan penjualan hasil produksi Non Litbang Lainnya	82.506.000	-	-
Penerimaan kembali belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	10.965.416	-	-

<b>Jumlah</b>	<b>772.744.576</b>	<b>766.805.813</b>	<b>0,01</b>
---------------	--------------------	--------------------	-------------

Realisasi Belanja  
Rp55.115.042.688

## B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Semester I TA 2024 adalah sebesar Rp55.115.042.688 atau 45,63% dari anggaran belanja sebesar Rp.110.071.024.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I TA 2024 adalah sebagai berikut:

### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	84.294.923.000	45.566.396.568	54,06
Belanja Barang	25.776.101.000	9.548.646.120	37,04
Belanja Modal			
Belanja Bantuan Sosial			
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>110.071.024.000</b>	<b>55.115.042.688</b>	<b>50,07</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>110.071.024.000</b>	<b>55.115.042.688</b>	<b>50,07</b>

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,15 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan antara lain:

Meningkatnya Belanja Barang berupa kegiatan Smart Fisheries Village (SFV) di beberapa lokasi Lingkup BRPBAPP serta dalam rangka mendukung operasional perkantoran dan pelayanan serta pemeliharaan atas aset yang dimiliki agar tetap dapat dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan operasional perkantoran dapat berjalan dengan baik.

### Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Pegawai	45.566.396.568	37.939.950.844	-0,17
Belanja Barang	9.548.646.120	9.015.714.831	0,06
Belanja Modal	-	-	-

Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>55.115.042.688</b>	<b>46.955.665.675</b>	<b>0,15</b>

*Belanja Pegawai*  
Rp.45.566.396.568

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp45.566.396.568 dan Rp37.939.950.844. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS serta PPPK sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Adanya penambahan pegawai PPPK penyuluhan perikanan yang memulai tugas sebagai PPPK dimulai bulan Maret Tahun 2024.

#### Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam Rupiah)

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>%</b>
Belanja Gaji Pokok PNS	15.651.641.400	13.908.230.520	0,125
Belanja Pembulatan Gaji PNS	231.919	211.999	0,09
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.091.258.640	987.766.308	0,10
Belanja Tunj. Anak PNS	349.886.714	324.410.236	0,08
Belanja Tunj. Struktural PNS	14.400.000	4.320.000	2,33
Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.162.914.000	3.085.072.000	0,02
Belanja Tunj. PPh PNS	328.707.754	118.601.148	1,77
Belanja Tunj. Beras PNS	786.626.400	775.618.200	0,01
Belanja Uang Makan PNS	1.650.823.000	1.694.764.000	-1,03
Belanja Tunj. Umum PNS	27.945.000	54.450.000	-0,49
Belanja Uang Lembur	-	-	-

Belanja Tunjangan Kinerja	22.501.974.144	17.000.419.530	0,32
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>45.566.408.611</b>	<b>37.953.863.941</b>	<b>0,20</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	(12.043)	(13.913.097)	<b>0</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>45.566.396.568</b>	<b>37.939.950.844</b>	<b>0,20</b>

*Belanja Barang  
Rp9.548.646.120*

#### **B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9.548.646.120 dan Rp9.015.714.831. Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2024 mengalami kenaikan 14,16 persen dari Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan, antara lain: Bertambahnya lokasi kegiatan Smart Fisheries Village pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan.

#### Perbandingan Realisasi Belanja Barang

30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam Rupiah)

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>%</b>
Belanja Barang Operasional	721.783.041	1.202.490.268	-18,85
Belanja Barang Non Operasional	4.195.392.539	4.565.241.623	31,55
Belanja Persediaan Barang Konsumsi	912.565.780	322.762.380	219,00
Belanja Jasa	2.237.861.098	1.409.319.212	110,83
Belanja Pemeliharaan	1.094.065.868	1.033.203.015	107,89
Belanja Perjalanan Dinas	386.977.794	482.698.333	41,47
Belanja Barang Utk diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>9.548.646.120</b>	<b>9.015.714.831</b>	<b>0,06</b>
<b>Pengembalian Belanja Barang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.548.646.120</b>	<b>9.015.714.831</b>	<b>0,06</b>

*Belanja Modal Rp0*

#### **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tidak terdapat anggaran serta realisasi belanja modal pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Peenambahan Nilai Gedung Lainnya	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B.5.1 Belanja Modal Tanah**

*Belanja Modal Tanah  
Rp0*

Realisasi Belanja Modal Tanah 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp000 dan Rp000. Tidak terdapat realisasi belanja modal tanah 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah

30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

*Belanja Modal  
Peralatan dan Mesin  
Rp0*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0. Tidak terdapat belanja modal peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2024.

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin

30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp000*

**B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp000 dan Rp000. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari renovasi beberapa Gedung Kantor satker lingkup Kantor Wilayah Akuntansi untuk menampung para pegawai baru dan meningkatkan kapasitas Gedung Kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.000*

**B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp000 dan Rp000. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dapat berupa adanya peningkatan jaringan radio untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.



Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan  
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Jaringan	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Belanja Modal  
Lainnya Rp.000*

### B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing- masing sebesar Rp.000 dan Rp.000. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2024. Belanja modal lainnya berupa pengadaan *software* untuk mendukung pekerjaan perkantoran sehari-hari.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya  
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Software	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>360.000.000</b>	<b>270.000.000</b>	<b>33,33</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>360.000.000</b>	<b>270.000.000</b>	<b>33,33</b>

*Belanja Bantuan  
Sosial Rp000*

### B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.000 dan Rp.000. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2024 dan TA 2023. Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk uang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar  
Rp1.263.857.458

### C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.263.857.458 dan Rp243.221.942.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp819.335.000

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp819.335.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel xx*

*Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran*

*30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023*

*(dalam rupiah)*

Keterangan	30 Jun 2024	31 Des 2023
Uang Tunai	0	0
<b>Uang Persediaan RM</b>	300.000.000	0
<b>Uang Persediaan PNB</b>	162.000.000	0
<b>Tambahahn Uang Persediaan RM</b>	357.335.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>819.335.000</b>	<b>0</b>

Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp0

#### C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp000. dan Rp000, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Tabel xx*  
*Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan*  
*30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023*

*(dalam rupiah)*

Keterangan	30 Jun 2024	31 Des 2023
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Kas Lainnya dan Setara Kas*  
*Rp6.368.000*

### **C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp6.368.000 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*

*Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas*  
*30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023*

*(dalam rupiah)*

Keterangan	30 Jun 2024	31 Des 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran SP2D No. <b>241361301010360</b>	1.800.000	0
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran SP2D No. <b>241361301010364</b>	4.568.000	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Piutang Bukan Pajak*  
*Rp2.677.540*

### **C.1.4. Piutang Bukan Pajak**

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.677.540 dan Rp10.965.416 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel xx*

*Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak*  
*30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023*

*(dalam rupiah)*

Uraian	30 Jun 2024	31 Des 2023
Piutang PNPB	0	0
Piutang Lainnya	2.677.540	10.965.416
<b>Jumlah</b>	<b>2.677.540</b>	<b>10.965.416</b>

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Piutang bukan Pajak Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan berasal dari Sewa Rumah Dinas yang dipotong melalui SPM No. 261 tanggal 6 Juni 2024 SP2D No. 241361504001726 tanggal 1 Juli 2024 untuk Pembayaran Gaji bulan Juli 2024 dasar akrual.

*Bagian Lancar  
Tagihan Tuntutan  
Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti  
Rugi (TP/TGR)  
Rp0*

**C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel xx  
Rincian Bagian Lancar TP/TGR  
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023*

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	30 Jun 2024	31 Des 2023
1.	TP/TGR	0	-
2.		0	0
3.		0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Bagian Lancar  
Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp0*

**C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2024 dan 31 Des 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Bagian Lancar TP/TGR*  
*30 Juni 2024 dan 31 Des 2023*

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	30 Jun 2024	31 Des 2023
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
2.		0	-
3.		0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Penyisihan  
 Piutang Tidak  
 Tertagih – Piutang  
 Jk. Pendek Rp0*

**C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp54.827, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek*

*(dalam rupiah)*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

*Beban Dibayar di  
 Muka  
 Rp0*

**C.1.8. Beban Dibayar di Muka**

Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Beban Dibayar di Muka*  
*30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023*

<b>Uraian</b>	<b>30 Jun 2024</b>	<b>31 Des 2023</b>
Pembayaran Internet	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0*

#### **C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima*  
*30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023*

<b>Jenis</b>	<b>30 Jun 2024</b>	<b>31 Des 2023</b>
Pendapatan Jasa Pelatihan	0	0
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Persediaan Rp435.476.918*

#### **C.1.10. Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp435.476.918 dan Rp232.311.353 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Persediaan 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023*  
*(dalam rupiah)*

<b>Persediaan</b>	<b>30 Jun 2024</b>	<b>31 Des 2023</b>
Barang Konsumsi	214.356.700	82.884.850
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Bahan Baku	99.511.218	252.868.855
Suku Cadang	0	0
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Persediaan Lainnya	121.609.000	97.424.800
<b>Jumlah</b>	<b>435.476.918</b>	<b>232.311.353</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik dan telah di lakukan opname terhadap semua item persediaan dan ditatausahakan dalam sakti modul persediaan

*Aset Tetap*  
*Rp280.364.725.567*

### **C.2. Aset Tetap**

Saldo Aset Tetap Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp280.364.725.567 dan Rp476.333.250.464.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

*Tanah*  
*Rp110.131.222.872*

#### **C.2.1. Tanah**

Tanah yang dimiliki oleh Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp110.131.222.872 dan Rp283.798.727.500

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Mutasi Tanah*  
*(dalam rupiah)*

<b>Saldo Awal</b>	<b>283.798.727.500</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah	0

Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi BMN Ke Properti Investasi	173.667.504.628
Penghapusan	-
<b>Saldo Per 30 Juni 2024</b>	110.131.222.872
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-
<b>Nilai Buku Per 30 Juni 2024</b>	<b>283.798.727.500</b>

Keseluruhan aset tetap berupa tanah yang dimiliki BRPBAPPP sudah mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Saldo tanah per 30 Juni 2024 sebagian dilakukan reklasifikasi BMN ke Properti Investasi berdasarkan laporan hasil pendampingan Inspektorat V KKP terkait identifikasi asersi Properti nomor B.137./ITJ.5/HP.470/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebesar Rp.173.667.504.628.

Rincian saldo tanah per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Luas (M2)	Lokasi	Nilai
26.660	Jl.Makmur Dg Sitakka No.129 maros ( Kel.Raya) Tanah Perumahan Komp II	15.162.209.000
19.627	Jl.Makmur Dg Sitakka No.129 maros ( Kel.Raya) Tanah Perumahan Komp II	12.843.418.000
39.308	Dusun Manrimisi Maros ( ITP Marana Kab Maros) Perumahan Maranak	1.833.325.000
101.026	JL Makmur Dg Sitakka NO 129 Maros (Kel.Raya) Kantor Maros --> Sebagian menjadi aset Properti Investasi.	71.876.204.872
127.445	Desa Punaga Takalar, Tambak Takalar	3.280.944.000
445.000	Desa Mattiro Tasi, Tanah Tambak dan Kantor Maranak --> Menjadi aset Properti Investasi	-
1.609	Desa Lawallu Kec Soppeng Riaja Barru, Tanah tambak	925.239.000
1.208	Desa Lawallu Kec.Soppeng Riaja Barru, Tanah Perumahan	539.976.000
90.000	Desa Lawallu Kec.Soppeng Riaja Barru, Tanah kantor	2.449.116.000
15.692	Desa Mattirotasi Kec. Maros Baru Tanah untuk Jalan Kompleks	1.220.791.000
	<b>Jumlah</b>	<b>110.131.222.872</b>

Peralatan dan  
Mesin  
Rp30.358.608.50  
3

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp30.358.608.503 dan Rp30.358.608.503.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin*  
*(dalam rupiah)*

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023</b>	<b>30.358.608.503</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah	0
Transfer Masuk	0
Reklasifikasi Masuk	0
Perolehan Lainnya	0
Mutasi Kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	0
Penghapusan	
<b>Saldo Per 30 Juni 2024</b>	<b>30.358.608.503</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(27.462.506.133)
<b>Nilai Buku Per 30 Juni 2024</b>	<b>2.896.102.307</b>

*Tabel xx*  
*Pembelian Peralatan dan Mesin 30 Juni 2024*  
*(dalam rupiah)*

<b>No.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>Nilai</b>
1.	Perolehan Lainnya	0
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

Gedung dan  
 Bangunan  
 Rp100.387.939.3  
 50

**C.2.3. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp100.387.939.350 dan Rp126.318.570.439.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan 30 Juni 2024*  
*(dalam rupiah)*

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023</b>	<b>126.318.570.439</b>
Mutasi tambah:	
Pemeliharaan Mess di Takalar	63.871.000
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi BMN ke Properti Investasi	25.994.502.089
<b>Saldo Per 30 Juni 2024</b>	<b>100.387.939.350</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(20.106.431.671)
<b>Nilai Buku Per 30 Juni 2024</b>	<b>80.281.507.679</b>

Mutasi Tambah :

Mutasi Tambah Bangunan Gedung berupa Pemeliharaan Mess di Takalar sebesar Rp.63.871.000

Mutasi kurang:

Reklasifikasi BMN ke Properti Investasi berupa 2 unit bangunan kolam/bak ikan sebesar Rp25.994.502.089.

Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Rp107.921.269.736  
36

#### C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp107.921.269.736 dan Rp107.731.192.754 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx

#### Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	107.731.192.754
Mutasi tambah:	
Pengecoran jalan instalasi tambak maranak	190.076.982
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
<b>Saldo Per 30 Juni 2024</b>	<b>107.921.269.736</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(21.733.276.090)
<b>Nilai Buku Per 30 Juni 2024</b>	<b>86.187.993.646</b>

Mutasi tambah:

-

Aset Tetap Lainnya  
Rp745.515.000

#### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp745.515.000 dan Rp745.515.000 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel xx

#### Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	745.515.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
<b>Saldo Per 30 Juni 2024</b>	<b>745.515.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(0)
<b>Nilai Buku Per 30 Juni 2024</b>	<b>745.515.000</b>

Konstruksi Dalam Pengerjaan  
Rp122.384.000

#### C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar

Rp122.384.000 dan Rp122.384.000 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Talud tambak superintensif (Perencanaan 85% = Rp63.712.000,00)
- Pembangunan Tambak Milenial shirmp Farm (Perencanaan 85% = Rp43.472.000,00)
- Renovasi Laboratorium tanah/pelayanan publik/laboratorium basah(Perencanaan 85% = Rp15.200.000,00)
- Konstruksi Dalam Pengerjaan dari SUPM Bone sebesar Rp.78.760.000.

Konstruksi dalam pekerjaan (KDP) tersebut di atas tidak dapat dilanjutkan pekerjaannya pada Tahun Anggaran 2021 akibat adanya reconfusing anggaran dan tidak ada perencanaan anggaran fisik pekerjaan tersebut untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai surat pernyataan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan dengan No. B.2998/BRSDM/BRPBAPPP/KU.520/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023. Konstruksi Dalam Pengerjaan akan diusulkan permohonan reuiu dalam rangka penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai surat Kepala BRPBAPPP No. B.3353/BRPBAPPP/HP.380/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024.

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp69.302.213.894*

### **C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp69.302.213.894 dan Rp72.741.747.732

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024.

Tabel xx

## Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

<b>No</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>Nilai Perolehan</b>	<b>Akum. Penyusutan</b>	<b>Nilai Buku</b>
1.	Peralatan dan Mesin	30.358.608.503	27.462.506.133	2.896.102.307
2.	Gedung dan Bangunan	100.387.939.350	20.106.431.671	80.281.507.679
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	107.921.269.736	21.733.276.090	86.187.993.646
4.	Aset Tetap Lainnya	745.515.000	0	745.515.000
	<b>Jumlah</b>	<b>239.413.332.589</b>	<b>69.302.213.894</b>	<b>170.111.118.695</b>

Properti Investasi  
Rp196.222.472.879

**C.3. Properti Investasi**

Properti Investasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp196.222.472.879 dan Rp0.

Properti Investasi adalah property untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk :

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh Masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administrative atau
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.

Properti Investasi  
Rp.199.662.006.717

**C.3.1. Properti Investasi**

Properti Investasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.199.662.006.717 dan Rp.0

*Tabel xx*  
*Rincian Properti Investasi*  
*30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023*

No	Uraian	30 Juni 2024	31 Des 2023
1.	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	15.562.763.000	0
2.	Tanah Sawah Irigasi	158.104.741.628	0
3.	Bangunan Kolam/Bak Ikan	25.994.502.089	0
	<b>Jumlah</b>	<b>199.662.006.717</b>	<b>0</b>

*Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Rp.3.439.533.838*

**C.3.1. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi**

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.3.439.533.838 dan Rp.0.

*Tabel xx*  
*Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi*

*(dalam rupiah)*

No	Properti Investasi	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Properti Investasi	199.662.006.717	3.439.533.838	196.222.472.879
	<b>Jumlah</b>	<b>199.662.006.717</b>	<b>3.439.533.838</b>	<b>196.222.472.879</b>

*Piutang Jangka Panjang Rp0*

**C.4. Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

*Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0*

**C.4.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang

melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing Satker adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR  
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2024	31 Des 2023
1.	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	0	-
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tagihan  
Penjualan  
Angsuran Rp0

**C.4.2. Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA per Satker 31 Juni Tahun 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Piutang TPA 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2024	31 Des 2023
1.	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Penyisihan  
Piutang Tidak  
Tertagih – Piutang  
Jangka Panjang  
Rp0

**C.4.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas



masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Tabel xx

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Panjang  
30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Tagihan TPA</b>			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Aset Lainnya  
Rp604.474.446

### C.5. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp604.474.446 dan Rp637.452.111

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lainnya.

Aset Tak Berwujud  
Rp0

#### C.5.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp686.788.265

Tabel xx

Rincian Aset Tak Berwujud 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (Paten)	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

*Tabel xx*  
*Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud*  
*(dalam rupiah)*

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023</b>	<b>686.788.265</b>
Mutasi kurang:	
Penghapusan	686.788.265
<b>Saldo Per 30 Juni 2024</b>	<b>0</b>
Amortisasi s.d. 30 Juni 2024	(0)
<b>Nilai Buku Per 30 Juni 2024</b>	<b>0</b>

Mutasi kurang:

Alih status penggunaan Aset Tak Berwujud berupa Paten 6 unit dari KKP kepada BRIN sebesar Rp686.788.265 sesuai BAST No. 132/SJ.450/2024 dan B-1853/II.2/PL.02.00/3/2024 tanggal 28 maret 2024. .

*Aset Lain-Lain*  
*Rp2.434.211.350*

### **C.5.2. Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp2.434.211.350 dan Rp2.534.814.350. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan sebagai Koordinator Wilayah Lingkup BRSDM Provinsi Sulawesi Selatan dan Pelaporan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Mutasi Aset Lain-lain*  
*(dalam rupiah)*

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023</b>	<b>2.534.814.350</b>
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	0
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	0
Penghapusan BMN	100.603.000
<b>Saldo Per 30 Juni 2024</b>	<b>2.434.211.350</b>
Amortisasi s.d. 30 Juni 2024	(2.128.725.066)
<b>Nilai Buku Per 30 Juni 2024</b>	<b>305.486.284</b>

*Akumulasi*  
*Penyusutan dan*  
*Amortisasi Aset*  
*Lainnya*  
*Rp2.128.725.066*

### **C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.128.725.066 dan Rp2.649.951.147. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel xx

*Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset  
Lainnya 30 Juni 2024*

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
<b>A.</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>			
1.	Software	0	0	0
2.	Hak Cipta	0	0	0
2.	Paten	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Aset Lain-lain</b>	2.434.211.350	2.128.725.066	305.486.284
	<b>Jumlah</b>	<b>2.434.211.350</b>	<b>2.128.725.066</b>	<b>305.486.284</b>
	<b>Total</b>	<b>2.434.211.350</b>	<b>2.128.725.066</b>	<b>305.486.284</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Kewajiban  
Jangka Pendek  
Rp4.099.762.907*

### **C.5. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.099.762.907. dan Rp106.621.118.

*Uang Muka dari  
KPPN  
Rp819.335.000*

#### **C.5.1. Uang Muka dari KPPN**

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp819.335.000 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Satker Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel xx

## Rincian Uang Muka dari KPPN 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	30 Jun 2024
1.	Uang Persediaan BRPBAPPP RM	300.000.000
2.	Uang Persediaan BRPBAPPP PNBPN	162.000.000
3.	Tambahan Uang Persediaan BRPBAPPP RM	357.335.000
	<b>Jumlah</b>	<b>819.335.000</b>

Utang kepada Pihak Ketiga  
Rp3.008.770.562

**C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga**

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.008.770.562 dan Rp106.621.118. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Pada penyajian laporan periode ini terdapat adanya utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.3.008.770.562 yang disebabkan oleh akrual belanja pegawai pada bulan Juli 2024. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel xx

## Rincian Utang kepada Pihak Ketiga 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	0
2.	Potongan Pajak yang belum disetor	0
3.	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	3.008.770.562
	<b>Total</b>	<b>3.008.770.562</b>

Pendapatan Diterima di Muka  
Rp0

**C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka**

Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Tabel xx

## Rincian Pendapatan Diterima di Muka 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah	Keterangan
Badan Swasta	0	Jasa Pelatihan Akuntansi
Instansi Pemerintah Lainnya	0	Penyusunan Neraca Awal
Badan Lainnya	0	Jasa Pelatihan Akuntansi
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	

Utang Yang belum  
ditagihkan  
Rp271.657.345

**C.5.4. Utang yang belum ditagihkan**

Utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp271.657.345 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx

## Rincian Utang yang belum ditagihkan

30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	30 Jun 2024	31 Des 2023
Utang yang belum ditagihkan	271.657.345	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ekuitas

Rp474.056.779.281

**C.7 Ekuitas**

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp474.056.779.281 dan Rp477.041.502.756. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

*Pendapatan PNPB  
Rp701.583.700*

**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp701.583.700 dan Rp768.110.301. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Jun 2024	30 Jun 2023	%
Pendapatan Sewa tanah, gedung dan bangunan	36.201.550	27.207.801	0,33
Pendapatan Penggunaan Sarana/prasarana sesuai dengan Tusi	956.500	130.000.000	-0,99
Pendapatan Penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya.	561.259.650	602.012.500	-0,06
Pendapatan penjualan hasil produksi Non Litbang Lainnya	2.506.000	0	0
Pendapatan Pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi lainnya.	20.660.000	8.890.000	-1.32
<b>Jumlah</b>	<b>701.583.700</b>	<b>768.110.301</b>	<b>-0,09</b>

Pendapatan akrual pada Satker Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan berasal dari Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN dan Iuran Badan usaha, pendapatan pendidikan dan Pendapatan Lain-Lain yang merupakan jenis pendapatan yang berasal dari pengembalian belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya.

**D.2 Beban Pegawai**

*Beban Pegawai  
Rp48.256.239.05*

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp48.256.239.052 dan Rp40.302.215.142. Beban Pegawai adalah beban

atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan informasi LO beban pegawai pada periode laporan 30 Juni 2024 mengalami penurunan 8,90 % dibanding periode Juni 2023 adanya pegawai yang telah memasuki batas usia pensiun dan meninggal dunia.

Rincian Beban Pegawai  
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023  
(dalam Rupiah)

Uraian	30 Jun 2024	30 Jun 2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	17.636.475.100	15.614.313.320	0,13
Beban Pembulatan Gaji PNS	245.267	234.839	0,04
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.229.258.180	1.108.602.753	0,11
Beban Tunj. Anak PNS	393.842.234	363.822.281	0,08
Beban Tunj. Struktural PNS	16.200.000	4.860.000	2,33
Beban Tunj. Fungsional PNS	3.562.818.000	3.461.418.000	0,03
Beban Tunj. PPh PNS	336.670.951	122.197.759	1,76
Beban Tunj. Beras PNS	885.551.760	870.705.660	0,02
Beban Uang Makan PNS	1.660.852.200	1.694.476.000	-0,02
Beban uang lembur	0	0	0,00
Beban Tunj. Umum PNS	31.415.000	61.165.000	-0,49
Beban Tunjangan Kinerja	22.502.910.360	17.000.419.530	0,32
<b>Jumlah Beban</b>	<b>48.256.239.052</b>	<b>40.302.215.142</b>	<b>0,20</b>
Pengembalian Beban	0	0	0
<b>Jumlah Beban</b>	<b>48.256.239.052</b>	<b>40.302.215.142</b>	<b>0,20</b>

Beban Persediaan  
Rp769.469.715

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni Tahun 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar

Rp769.469.715 dan Rp420.667.723. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan  
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023  
(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	%
Beban Persediaan Konsumsi	357.400.500	145.791.450	1,45
Beban Persediaan Bahan Baku	221.366.915	182.744.559	0,21
Beban Persediaan Lainnya	190.702.300	92.131.714	1,07
<b>Jumlah Beban</b>	<b>769.469.715</b>	<b>420.667.723</b>	<b>0,83</b>

Beban persediaan pada periode 30 Juni 2024 mengalami kenaikan 0,83% karena adanya kegiatan Smart Fisheries Village di beberapa lokasi lingkup BRSDM.

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

*Beban Barang dan Jasa*  
Rp7.604.555.476

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.604.555.476 dan Rp7.200.906.132. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Secara keseluruhan terjadi Kenaikan Beban Barang dan Jasa, hal ini disebabkan peningkatan beberapa pos beban seperti beban langganan listrik, beban jasa profesi, beban honor dan beban bahan seiring dengan meningkatnya aktivitas pelayanan dan diklat. Walaupun secara total beban barang dan jasa mengalami kenaikan tetapi pada beberapa pos beban terjadi penurunan karena penghematan atas beban-beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*, penurunan beban sewa yang



disebabkan adanya pembelian aset sehingga tidak dilakukan penyewaan. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa  
30 Juni TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Jun 2024	30 Jun 2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	533.280.781	1.150.892.363	0,54
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	37.163.500	13.601.000	1,73
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	1.113.520	3.609.460	0,69
Beban Honor Operasional Satker	86.935.000	76.530.000	0,14
Beban Barang Operasional Lainnya	129.348.000	109.272.500	0,18
Beban Bahan	632.820.366	528.989.768	0,20
Beban Honor Output Kegiatan	2.103.400.000	2.472.070.000	0,15
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.788.148.992	1.564.581.855	0,14
Beban Langganan Listrik	625.715.745	593.587.254	0,05
Beban Langganan Telepon	489.363	466.297	0,05
Beban Langganan Air	19.341.800	11.273.600	0,72
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	24.461.596	22.956.000	0,07
Beban Sewa	156.000.000	99.650.000	0,57
Beban Jasa Profesi	2.200.000	3.100.000	-0,29
Beban Jasa Lainnya	1.459.236.813	550.326.035	1,65
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	4.900.000	0	0
<b>Jumlah Beban</b>	<b>7.604.555.476</b>	<b>7.200.906.132</b>	<b>0,06</b>

*Beban barang dan jasa pada 30 Juni 2024 ini mengalami kenaikan 0,06% dibanding 30 Juni 2023, hal ini disebabkan karena percepatan Realisasi Anggaran dimana Revolving GUP dilakukan tiap bulan dan melakukan permintaan TUP setiap bulan.*

Beban  
Pemeliharaan  
Rp1.058.090.868

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.058.090.868 dan Rp1.007.249.515. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan  
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	717.431.023	616.318.262	0,16
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	340.659.845	390.931.253	0,13
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0
Beban Persediaan bahsn untuk Pemeliharaan	0	0	0
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0
<b>Jumlah Beban</b>	<b>1.058.090.868</b>	<b>1.007.249.515</b>	<b>0,05</b>

Pengalokasikan anggaran pemeliharaan terhadap aset yang di kelola untuk mempertahankan kondisi dan masa manfaat aset dalam rangka menunjang kegiatan operasional balai.

Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp426.020.717

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp426.020.717 dan Rp482.698.333. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban

perjalanan dinas disebabkan oleh meningkatnya frekuensi perjalanan dinas pegawai untuk menghadiri kegiatan rapat koordinasi atau pelatihan yang diselenggarakan Kantor Pusat dimana perjalanan dinasnya ditanggung sendiri oleh masing-masing satuan kerja. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas  
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	419.945.717	476.698.333	-0,12
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000	4.200.000	-0,89
Beban Perjalanan Dinas -Pandemi Covid19	2.125.000	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.500.000	1.800.000	0,94
<b>Jumlah Beban</b>	<b>426.020.717</b>	<b>482.698.333</b>	<b>-0,12</b>

*Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Rp0*

**D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni Tahun 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	%
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual	0	0	0
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual	0	0	0
<b>Jumlah Beban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Rp0

Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Peningkatan beban bansos yang diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial

30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang	0	0	0
<b>Jumlah Beban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0

**D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp4.004.013.951. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan

dan Amortisasi untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1.229.225.638	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1.636.928.425	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	189.137.887	0
Beban Penyusutan Aset Tetap yg digunakan dalam operasi Pemerintah	0	65.793.158	0
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>0</b>	<b>3.121.085.108</b>	<b>0</b>
Beban Amortisasi Hak Cipta	0	0	0
Beban Amortisasi Paten	0	21.405.913	0
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0	0	0
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>0</b>	<b>21.405.913</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Beban</b>	<b>0</b>	<b>4.004.013.951</b>	<b>-100</b>

*Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rp.(54.827)*

**D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp54.827) dan Rp.0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih  
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	%
--------	--------------	--------------	---

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	-54.827	0	0)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	0	0	0
<b>Jumlah Beban</b>	<b>-54.827</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>

Kegiatan Non Operasional  
Rp93.651.666

#### **D.11 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Kegiatan Non Operasional

30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	%
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	58.591.750	1.250.000	1,78
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	35.059.916	22.818.696.233	-2789,03
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
<b>Jumlah Beban</b>	<b>93.651.666</b>	<b>30 Juni 2023</b>	<b>264,18</b>

Pos Luar Biasa  
Nihil

#### **D.12 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.

## PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal*  
Rp477.041.502.756

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 masing-masing adalah sebesar Rp477.041.502.756 dan Rp483.848.745.234.

*Defisit LO*  
Rp57.319.085.635

### E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah defisit sebesar Rp57.319.085.635 dan Rp29.829.694.262. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi*  
Rp0

### E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0.

*Penyesuaian Nilai Aset*  
Rp0

#### E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan*  
Rp0

#### E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 30 Juni tahun 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2024*

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	0
3.	Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0
4.	Barang Persediaan Lainnya	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>

Selisih Revaluasi Aset Rp0

#### **E.4.3. Selisih Revaluasi Aset**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp253.947.982

#### **E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp253.947.982 dan Rp22.723.986.933.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*

*Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi 30 Juni 2024*

<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Nilai Koreksi</b>
Peralatan dan Mesin	253.947.982
Gedung dan Bangunan	(0)
<b>Jumlah</b>	<b>253.947.982</b>

Koreksi Lain-lain Rp0

#### **E.4.5. Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*

*Rincian Koreksi Lain-lain 30 Juni 2024*

<b>Jenis Koreksi</b>	<b>Jumlah</b>
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

Transaksi Antar Entitas Rp54.080.414.178

#### **E.5. Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp54.080.414.178 dan Rp46.188.859.862



Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

*Tabel xx*  
*Transaksi Antar Entitas 30 Juni 2024*

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	772.744.576
Ditagihkan ke Entitas Lain	(55.115.042.688)
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>54.080.414.178</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

**E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar Rp772.744.576 sedangkan DKEL sebesar Rp55.115.042.688.

**E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0 terdiri dari:

*Tabel xx*  
*Transfer Masuk 30 Juni 2024*

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	-	0
2.	Persediaan	-	0
<b>Jumlah</b>			<b>0</b>

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp0.

**E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang,

maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*

*Pengesahan Hibah Langsung 30 Juni 2024*

No.	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.	-	Uang	0
2.	-	Uang	0
		Barang	0
<b>Total Pengesahan</b>			<b>0</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
<b>Jumlah</b>			<b>0</b>

*Ekuitas Akhir*  
*Rp474.056.779.2*  
*81*

**E.6. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp474.056.779.281 dan Rp477.483.923.901

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

Tidak terdapat catatan kejadian penting setelah tanggal neraca.

### **F.1 Pengungkapan Lain-lain**

1. Masih terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan 30 Juni 2024. Konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.122.384.00 yang berupa:

- Pengembangan Talud tambak superintensif (Perencanaan 85% = Rp63.712.000,00)
- Pembangunan Tambak Milenial shrimp Farm (Perencanaan 85% = Rp43.472.000,00)
- Renovasi Laboratorium tanah/pelayanan publik/laboratorium basah (Perencanaan 85% = Rp15.200.000,00)
- Konstruksi Dalam Pengerjaan satker Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone Sebesar Rp.78.760.000

Konstruksi dalam pekerjaan (KDP) tersebut di atas tidak dapat dilanjutkan pekerjaannya pada Tahun Anggaran 2021 akibat adanya reconfusing anggaran dan tidak ada perencanaan anggaran fisik pekerjaan tersebut untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai surat pernyataan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan dengan No. B.2998/BRSDM/BRPBAPP/KU.520/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023.

Konstruksi Dalam Pengerjaan baru akan diusulkan permohonan reuiu dalam rangka penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai surat Kepala BRPBAPP No. B.3353/BRPBAPP/HP.380/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024.

2. Properti Investasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp196.222.472.879.

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk :

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh Masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administrative atau

2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.
3. Indikator Capaian Output Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan penyuluhan Perikanan atas pelaksanaan anggaran sampai dengan bulan Juni 2024 sudah terkonfirmasi dan mencapai nilai 100.